

## Faktor Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur

Vilnia Asista<sup>1</sup>, Mira Hasti Hasmira<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [mirahasti@fis.unp.ac.id](mailto:mirahasti@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Program PKH merupakan bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ternyata realita di Nagari III Koto Aur Malintang Timur keberhasilan PKH membantu keluarga kurang mampu sudah berjalan dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Perspektif teori struktural fungsional oleh Robert K. Merton dijadikan pisau analisis terhadap data yang di peroleh. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Informan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, yang dipilih secara *purposive*. Adapun kriteria yang telah ditentukan, seperti pendamping PKH, perangkat nagari, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan koordinator PKH. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi, peneliti secara langsung datang ke lokasi penelitian. Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara mendalam yang dilakukan di rumah penerima PKH setelah sholat dzuhur, serta melakukan studi dokumen terhadap data-data yang diperoleh dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pemerintah nagari. Teknik analisis data dari Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab keberhasilan PKH pada keluarga kurang mampu yaitu, proses seleksi calon penerima/ketepatan sasaran, peran aktif pendamping dan sosialisasi penyuluhan, mindset dan tanggung jawab KPM, serta pemanfaatan bantuan PKH dibidang pendidikan. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menekankan peran tanggung jawab dan sosialisasi dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH).

**Kata Kunci:** Faktor Keberhasilan; Pemanfaatan; Program Keluarga Harapan

### Abstract

PKH is a social assistance program issued by the government with the aim of accelerating poverty alleviation through access to education, health, and social welfare. In reality, in Nagari III Koto Aur Malintang Timur, the success of PKH in helping underprivileged families has been running well. This article aims to explain the success factors of the PKH in Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. The perspective of the structural functional theory by Robert. K Merton is used as an analytical toll for the data obtained. The research method used is qualitative research with a case study research type. Informants in this study numbered 21 people, who were selected purposively. The predetermined criteria include PKH facilitators, village officials, Beneficiary Families (KPM), and PKH coordinators. Data collection techniques include participant observation, in-depth interviews conducted at PKH recipient homes, and document studies of data obtained from Beneficiary Families (KPM) and the village government. The data analysis technique used by Miles and Huberman involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that several factors contribute to the success of the PKH for low-income families, including the selection process for prospective recipients/target accuracy, the active role of facilitators and outreach programs, the mindset/awareness and responsibility of beneficiaries, and the utilization of PKH assistance in the education sector. This study provides a new perspective by emphasizing the role of responsibility and outreach in the success of the PKH.

**Keywords:** Program Keluarga Harapan; Success factors; Utilization.

**How to Cite:** Asista, V. & Hasmira, M. H. (2025). Faktor Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 8(3), 350-362.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

## Pendahuluan

Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu, keluarga kelompok, atau bahkan negara mengalami keterbatasan yang menghambat mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keterbatasan ini mencakup kesulitan ekonomi, ketidakadilan, dan kurangnya perlindungan hukum, yang pada akhirnya menghalangi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih layak lagi (Diyana 2024). Tingginya angka kemiskinan dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti pada bidang pendidikan, kemiskinan berdampak angka putus sekolah yang tinggi, kurangnya wawasan dan keterampilan, dan pengetahuan yang baik. Di bidang Kesehatan, kemiskinan meningkatkan resiko terkena penyakit, kurangnya kesehatan ibu hamil dan kekurangan gizi (Nafisah & Kholifah, 2023). Kemiskinan didorong oleh beberapa faktor, yaitu kurang tersedia lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan, terjadinya bencana alam, terjadinya konflik dan minimnya infrastruktur. Kemiskinan akan membawa dampak apabila terus dibiarkan, seperti tingginya tingkat kriminalitas, tertutupnya akses pendidikan dan tingginya angka pengangguran (Sukma 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya Sumatera Barat mencapai 345,73% pada Maret tahun 2024. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat bertambah sebesar 5,36 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang berjumlah sebesar 340,37 ribu orang (BPS Sumbang, 2024). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin. Meskipun demikian, faktor-faktor keberhasilan yang mendorong program-program ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan penurunan angka kemiskinan (Usman 2014).

Pendidikan adalah faktor penting dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Ketika sistem pendidikan masyarakat mengalami kendala, dampaknya akan terasa pada berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, terutama karena keterbatasan ekonomi yang dimilikinya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut (Zulkarnain 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga yang tergolong sangat miskin. Program ini diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan menurunkan angka kemiskinan (Wardani et al. 2023). Tujuan dari program ini yakni: (1) Meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan bagi penerima PKH. (2) Meningkatkan taraf pendidikan penerima PKH. (3) Meningkatkan status Kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak di bawah umur (0-5 tahun), serta anak prasekolah yang berasal dari keluarga miskin (Setyawardani, Paat & Lesawengen, 2020).

Adapun beberapa kriteria yang ditetapkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut. (1) Kriteria penerima PKH Kesehatan: ibu hamil atau menyusui, dengan batas maksimal dua kali kehamilan dan anak usia 0-6 tahun, dengan batas maksimal dua anak. (2) Kriteria penerima PKH Pendidikan: anak sekolah dasar (SD), anak sekolah menengah pertama (SMP), anak sekolah menengah atas (SMA). Anak usia 6-12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun. (3) Kriteria penerima PKH Sosial: lanjut usia di atas 60 tahun, dengan batasan maksimal 1 orang dalam satu keluarga dan penyandang disabilitas, dengan prioritas pada penyandang disabilitas berat serta batasan maksimal 1 orang dalam satu keluarga (Despriyani & Imanda 2024).

Sampai saat ini, pelaksanaan PKH telah menunjukkan dampak yang cukup besar. Sekitar 10 juta keluarga tercatat sebagai penerima manfaat program ini. Dalam bidang pendidikan, lebih dari 78% anak-anak dari KPM tercatat aktif mengikuti kegiatan belajar di sekolah, dan sekitar 75% keluarga memanfaatkan bantuan untuk membeli perlengkapan sekolah. Di bidang Kesehatan, sebanyak 97% ibu hamil secara rutin menjalani pemeriksaan kehamilan, sementara 94% bayi mendapatkan pemeriksaan kesehatan pada bulan pertama kelahirannya. Dari sisi ekonomi, program ini mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 4,8% serta mendukung keuangan KPM, dengan 17% KPM mulai menabung dan sebanyak 600.000

---

KPM berhasil keluar secara mandiri dari PKH dikarenakan membaiknya kondisi ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa PKH telah dimanfaatkan secara optimal oleh KPM di Indonesia dalam berbagai aspek (Kemensos 2023).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 terdapat sekitar 16.092 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di 17 Kecamatan. Menurut data tersebut didapat salah satu daerah, Kecamatan IV Koto Aur Malintang tercatat sebagai daerah penerima PKH tertinggi pada tahun 2020 yaitu sekitar 1.315 penerima manfaat. Hal tersebut membuktikan, bahwa Kecamatan IV Koto Aur Malintang Timur masih adanya masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Kemiskinan di Kecamatan IV Koto Aur Malintang hanya berkurang sedikit setiap tahunnya, hal ini menyebabkan keterbatasan ekonomi dikarenakan kurangnya penghasilan yang didapatkan masyarakat kurang mampu di Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Oleh karena itu pemerintah menyalurkan program bantuan sosial PKH bertujuan untuk membantu masyarakat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan. Berdasarkan data pendamping PKH Kecamatan IV Koto Aur Malintang, daerah ini terbagi menjadi lima nagari, yaitu Nagari III Koto Aur Malintang Induk, Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Nagari III Koto Aur Malintang Utara, dan Nagari Balai Baiak. Dari kelima nagari tersebut, Nagari III Koto Aur Malintang Timur sebagai salah satu daerah yang melaksanakan program PKH yang masyarakatnya memiliki partisipasi aktif dan bertanggung jawab atas komitmennya setelah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial PKH.

Nagari III Koto Aur Malintang Timur telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2013, pelaksanaan program PKH ini di bawah perlindungan Dinas Sosial dan sesuai dengan peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang program PKH itu sendiri. Tercatat sekitar 141 KK penerima PKH dari 400 KK pada tahun 2024 di Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat di Nagari ini yang hidup dalam kondisi kurang mampu. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui wawancara dan observasi dengan pendamping PKH Nagari III Koto Aur Malintang Timur mengenai pemanfaatan bantuan dana PKH di bidang pendidikan. Dari kondisi pendidikan anak-anak penerima PKH di nagari tersebut memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat, seperti banyaknya anak-anak yang tetap melanjutkan sekolah sampai jenjang SMA/Sederajat dengan memanfaatkan uang bantuan yang diberikan, hal ini terbukti dari berkurangnya angka putus sekolah. Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat secara langsung bagaimana keadaan dan realita rumah penerima bantuan PKH serta pemanfaatan langsung dana yang diterima masyarakat.

Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ditentukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No 1. Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Tahapan tersebut mencakup penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah sebagai tahap utama dalam menentukan masyarakat yang memang berhak menerima bantuan sosial PKH. Selanjutnya, dilakukan serangkaian proses yang meliputi rapat awal, validasi data, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan sosial, mutakhir data, serta verifikasi komitmen dari KPM. Proses pemilihan calon penerima PKH ini melibatkan beberapa pihak, salah satunya pemerintah nagari setempat memberikan data masyarakat kurang mampu di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, serta keterlibatan pendamping dan koordinator PKH untuk melakukan survei langsung ke lokasi, hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana keadaan sosial dan ekonomi calon penerima bantuan PKH.

Alasan dilaksanakannya program PKH di daerah ini yaitu untuk membantu keluarga kurang mampu khususnya di bidang pendidikan. Sejauh ini pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Halja Sariahmad selaku pendamping PKH Nagari III Koto Aur Malintang Timur bahwa masyarakat penerima bantuan sosial PKH nyata nya sudah menggunakan dan memanfaatkan uang bantuan yang diterima dengan baik sesuai kebutuhan. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan dana untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya, kemudian terlihat anak penerima PKH aktif melanjutkan pendidikan sampai tamat SMA/Sederajat.

Keberhasilan dalam penggunaan dan pemanfaatan uang PKH berlaku dalam penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, peran aktif pendamping memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat penerima agar dapat menggunakan uang bantuan sesuai dengan syarat dan kewajibannya sebagai KPM. Berdasarkan data evaluasi yang dilakukan oleh pendamping PKH Nagari III Koto Aur Malintang Timur, didapatkan bahwasanya pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik, hal ini

disebabkan karena mindset dan tanggung jawab dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat yang menerima bantuan sosial PKH sadar akan kewajibannya setelah terpilih sebagai keluarga penerima bantuan sosial PKH dan menjalankan komitmennya sebagai keluarga penerima manfaat, seperti memanfaatkan dana bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan pendidikan anaknya. Selain mindset dan tanggung jawab, sosialisasi yang diberikan oleh pendamping PKH terkait tujuan program PKH juga berdampak positif dalam perubahan perilaku keluarga penerima bantuan sosial PKH di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, dimana keluarga penerima ikut serta berpartisipasi mengikuti kegiatan pertemuan setiap satu bulan sekaligus sebagai partisipasi masyarakat penerima bantuan PKH.

Penelitian terkait PKH sudah pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wardani et al. 2023) mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian implementasi PKH di daerah ini telah berjalan dengan efektif, namun masih ada beberapa tantangan dalam hal ketepatan sasaran, waktu pencairan, dan kinerja pendamping. Kemudian riset oleh (Arlayati & Ikhwan 2025) menjelaskan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Sapih dapat dievaluasi berdasarkan lima indikator menurut Sutrisno: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. PKH telah membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

Selanjutnya penelitian Putri & Putra (2024) mengenai Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Menjelaskan bahwa penerima bantuan sebagian besar sudah memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan PKH, program ini berjalan sesuai tujuan di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu proses pemanfaatan bantuan, proses seleksi calon penerima bantuan, dan proses administrasi penyaluran PKH. Selanjutnya riset (Infatih, Sukidin & Hartanto, 2019) mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran, ketepatan tujuan dan ketepatan biaya belum sepenuhnya efektif. Studi yang dilakukan juga oleh Nuryanti (2019) mengenai Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH sangat bermanfaat untuk menyukseskan wajib belajar XII tahun di daerah tersebut. Dan ada riset Yulianti (2020) mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Menjelaskan bahwa PKH belum sepenuhnya efektif karena kurangnya ketepatan sasaran dan membantu dalam pendidikan dan Kesehatan.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), namun dalam hal ini belum banyak yang mengkaji faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada pendekatan struktural fungsional dari Robert K. Merton yang jarang dikaji dalam konteks PKH. Berdasarkan dengan beberapa penelitian diatas, telah mengungkapkan tentang ketidak efektifan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di masyarakat, sedangkan penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan PKH khususnya dibidang pendidikan dengan menggunakan teori struktural fungsional oleh Robert K. Merton. Berdasarkan fenomena di atas penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Selain itu, topik yang diangkat dalam penelitian ini menjadi topik penting untuk dikaji, sebab hasil temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah, masyarakat, dan instansi PKH.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus (Sugiyono 2018). Melalui pendekatan ini peneliti menggali informasi dan data sebanyak mungkin untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat kurang mampu di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian dilakukan lebih kurang 9 bulan di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive* (Creswell 2016). Subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu yang diambil sesuai tujuan penelitian dengan jumlah informan 21 orang. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Nagari III Koto Aur Malintang Timur 1 orang, Koordinator PKH Kabupaten Padang Pariaman 1 orang, Pendamping PKH 1 orang, penerima PKH 14 orang, anak penerima PKH 2 orang, dan tetangga penerima PKH 2 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pertama observasi partisipasi dimana peneliti ikut serta mengamati secara langsung ke lokasi penelitian dan melihat realita yang terjadi di lapangan sesuai dengan pedoman observasi yang telah disusun. Kedua wawancara terstruktur peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih sesuai kriteria yang mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun dan melakukan wawancara berulang agar mendapatkan data yang akurat. Ketiga peneliti melakukan studi dokumen terhadap data-data berupa foto, arsip yang diperoleh dari

---

masyarakat penerima PKH serta pihak pemerintah nagari. Data yang didapat kemudian ditelaah sesuai dengan informasi relevan untuk menunjang penelitian. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman 2009). Teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian ini yaitu teori Struktural Fungsional dari Robert K. Merton yaitu menggunakan konsep fungsi manifest dan fungsi laten, serta disfungsi (Ritzer, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat kurang mampu di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi yaitu:

### Ketepatan Sasaran/Seleksi Calon Penerima

Proses seleksi calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Tahapan tersebut mencakup penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sumber utama dalam menentukan calon penerima PKH. Selanjutnya, dilakukan serangkaian proses yang meliputi rapat awal, validasi data, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan sosial mutakhir data, serta verifikasi komitmen dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Koordinator PKH Kabupaten Padang Pariaman, para calon penerima PKH sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah. Sehingga untuk syarat awal agar mendapatkan bantuan sosial PKH, yaitu masyarakat terdaftar di DTKS pemerintah dengan kriteria masyarakat miskin dan memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Yusnita, S.Pd (40 th) selaku koordinator PKH Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut.

“...Sebelum ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan PKH, kami mendapatkan data mengenai masyarakat miskin dari setiap nagari. Tim koordinator lapangan akan turun langsung untuk melihat keadaan rumah calon penerima bantuan bersyarat ini, apakah memang betul kurang mampu dan apakah memang layak dia dipilih sebagai penerima bantuan, sebab kalau misalnya tidak sesuai foto rumah yang dikirim dengan foto rumah yang di survei secara langsung, maka dia tidak dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, karena PKH ini memang khusus untuk keluarga yang kurang mampu...” (Wawancara langsung 25 Maret 2025)

Pernyataan (Ibu Yusnita, S.Pd sebagai koordinator PKH Kabupaten Padang Pariaman 40 th) menyatakan bahwa dirinya dan tim lapangan memiliki tanggung jawab dalam proses seleksi calon penerima bantuan PKH ini. Menurut ibu yus PKH ini memang hanya diberikan kepada keluarga kurang mampu dan memiliki keterbatasan ekonomi. Dalam pelaksanaan tugasnya Ibu Yusnita juga menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat di Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Hal tersebut bertujuan agar proses seleksi calon penerima bantuan sosial PKH sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Pak Halja Sariahmad (40 th) selaku pendamping PKH Nagari III Koto Aur Malintang Timur sebagai berikut.

“...Untuk masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial PKH ini yang paling utama harus terdata terlebih dahulu di Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), selain itu kami juga ada tim yang akan melakukan survei secara langsung ke rumah calon penerima untuk melihat keadaan yang sebenarnya, dan satu lagi yang paling penting untuk kriteria harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang program PKH itu sendiri dan mereka memang layak mendapatkan bantuan...” (Wawancara langsung 14 April 2025).

Ungkapan yang disampaikan oleh Pak Halja Sariahmad, S.Pd (40 th, pendamping PKH Nagari III Koto Aur Malintang Timur), menjelaskan bahwa masyarakat yang berhak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) memang sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemilihan calon penerima bantuan. Kemudian keikutsertaan tim koordinator lapangan secara langsung datang ke lokasi untuk melihat bagaimana realita masyarakat ini, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau belum.

Sejalan juga dengan penjelasan oleh Bapak Budi Satria, S.Ap (36 th) selaku sekretaris Nagari III Koto Aur Malintang Timur mengenai proses seleksi calon penerima bantuan sosial PKH. Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial bersyarat ini sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

pemerintah dan memenuhi beberapa kriteria tertentu. Penggunaan DTKS bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan calon penerima manfaat, seperti keluarga yang layak menerima tetapi tidak terdata, dan keluarga yang tidak layak menerima tetapi terdata. Selain itu proses verifikasi tidak hanya di bagian awal saja, tetapi juga melibatkan tinjauan langsung ke lapangan oleh tim survei, yang aktif datang ke lokasi tempat tinggal calon penerima bantuan sosial PKH, hal ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jawaban yang senada juga di sampaikan oleh Ibu Witra (39 th) sebagai keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai proses seleksi calon penerima bantuan PKH, terdapat beberapa tahapan untuk proses pemilihan calon penerima PKH dan ada beberapa kriteria yang harus disesuaikan dengan tujuan program PKH sebelum mereka ditetapkan sebagai KPM.

Ungkapan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses seleksi calon penerima bantuan sosial PKH dilakukan pada awal proses, hal ini bertujuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran, seperti keluarga kurang mampu yang memiliki anak usia sekolah, serta keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, kriteria tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang program PKH. Proses seleksi calon penerima menggunakan DTKS dan survei lapangan dilakukan oleh pendamping PKH dan tim survei lapangan. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional Merton mengenai fungsi manifest, dimana program PKH merupakan instansi yang menimbulkan konsekuensi positif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Sesuai dengan temuan (Syahdillah & Suriyani 2023) dimana ketepatan sasaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan program PKH, hal tersebut dapat berkontribusi memberikan tolak ukur mengenai program yang sudah dilaksanakan.

#### **Pemanfaatan Bantuan PKH Bidang Pendidikan**

Pemanfaatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan ditujukan untuk meringankan beban biaya pendidikan anak dari keluarga penerima manfaat. Bantuan ini diberikan kepada anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat, SMP/MTS/Sederajat, dan SMA/MA/Sederajat atau anak-anak berusia 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Dalam pelaksanaannya, anak-anak penerima bantuan PKH diwajibkan mengikuti kegiatan belajar melalui fasilitas pendidikan yang tersedia. Masyarakat penerima bantuan sosial PKH telah memanfaatkan uang PKH untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dengan melengkapi peralatan sekolah, seperti membeli seragam sekolah, tas, sepatu, alat-alat tulis dan buku lks serta membayar komite atau spp sekolah. Tujuan utama dari pembentukan komite ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dukungan sumber daya, serta pengawasan di tingkat satuan pendidikan (Nurafni, Saguni & Hasnah 2022). Hal tersebut didapat berdasarkan wawancara dengan penerima PKH bidang pendidikan Ibu Resa Yulastri (44 th) sebagai penerima PKH di Nagari III Koto Aur Malintang Timur menyatakan sebagai berikut.

“...Bantuan PKH untuk anak yang di dapat ibu gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah anak terlebih dahulu. Setiap keluar bantuan PKH ini, baju atau buku anak ibu wajib bertukar, ibu memang lebih mendahulukan pendidiknya anak yang paling utama, bagaimana caranya anak kita sekolah bisa menggunakan pakaian yang bagus, tas bagus, dan sepatu yang bagus, biarlah kita miskin tapi kalau untuk sekolah anak itu nomor satu...” (Wawancara langsung 06 Maret 2025).

Pernyataan informan di atas yang di sampaikan oleh Ibu Resa didapatkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Nagari III Koto Aur Malintang Timur benar adanya memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan cara menggunakan dana bantuan PKH untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan sekolah anaknya. Seperti, baju seragam, tas sekolah, buku tulis, sepatu sekolah, dan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Melna Sari (32 th), tetangga penerima PKH. Menyatakan bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH di bidang pendidikan benar-benar menggunakan dana bantuan dengan tepat. Dana PKH digunakan sesuai kebutuhan anak-anak mereka, misal contohnya ketika dana keluar maka mereka pergi ke pasar minggu untuk membeli perlengkapan sekolah dan alat-alat tulis. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Cendra Yeti (KPM, 45 th), menyatakan sebagai berikut.

“...Ibu punya dua anak yang masih bersekolah, satu di jenjang SMA, satu lagi di jenjang SD, keduanya mendapatkan bantuan PKH, yang SMA dapat sebesar Rp.600.000 per tiga bulannya, sedangkan yang SD dapat sebesar Rp. 275.000 per tiga bulannya. Anak ibu yang duduk di SMA harus membayar komite tiap tahunnya sebesar Rp. 150.000. Setiap uang bantuan yang ibu terima 3 bulan sekali itu digunakan untuk biaya sekolah anak-anak terlebih dahulu. Nanti

ketika uang bersisa maka uang tersebut disimpan untuk biaya sekolah lainnya...” (Wawancara langsung 01 Maret 2025).

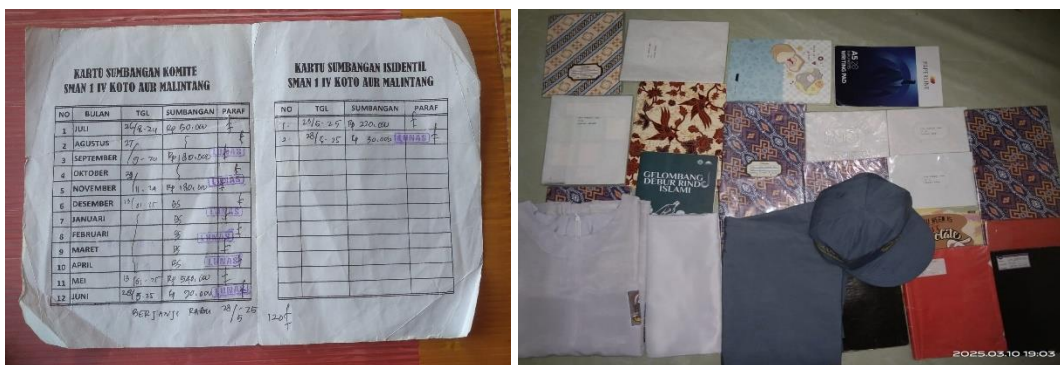
Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Cendra Yeti (KPM, 45 TH), mengenai penggunaan dana PKH, ia menyatakan bahwa uang bantuan yang diterima setiap 3 bulan sekali dimanfaatkan secara baik, khususnya dalam menunjang biaya sekolah anak. Karena menurutnya dana PKH ini sangat membantu sekali bagi keluarganya, terutama untuk kebutuhan pendidikan anaknya sebab ia merupakan *single parent* atau orang tua tunggal yang bekerja mencari nafkah untuk membiayai keluarganya. Hal yang sejalan juga diungkapkan langsung oleh Bapak Budi Satria, S.Ap (36 th), selaku pemerintah nagari menjelaskan.

“...Saya selaku pemerintah nagari di sini, melihat bahwasanya masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan sosial PKH telah menggunakan dana bantuan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program PKH di daerah ini. Selain penggunaan dana. Sehingga pelaksanaan PKH untuk membantu keluarga kurang mampu di Nagari III Koto Aur Malintang Timur sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari segi realita bagaimananya masyarakat menggunakan dan memanfaatkan bantuan yang diberikan...” (Wawancara langsung, 07 Maret 2025)

Ungkapan Bapak Budi Satria, S.Ap (36 th, perangkat nagari), menyatakan bahwa masyarakat yang terpilih sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut telah mencapai indikator dari keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Dengan menggunakan dan memanfaatkan uang bantuan untuk melengkapi kebutuhan dasar terutama menunjang keberlangsungan pendidikan anaknya sehingga hal ini dapat mengurangi angka putus sekolah bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial yang diberikan setiap 3 bulan sekaligus digunakan secara tepat oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dalam bidang pendidikan. Pernyataan dari ibu-ibu penerima PKH, tetangga penerima PKH, dan perangkat nagari menunjukkan bahwa bantuan PKH digunakan paling utama untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, seperti membeli seragam, buku, tas, dan sepatu. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran yang tinggi dari orang tua terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya nanti. Hal ini sejalan dengan teori struktural fungsional Merton, yang mana menurutnya masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. terlihat dari hasil wawancara dengan informan, bahwa masing-masing menjalankan fungsinya, seperti KPM menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan dana bantuan yang diberikan, dan pemerintah menjalankan fungsinya agar pelaksanaan PKH tepat sasaran. Selain itu ada fungsi manifest (nyata) yang ditimbulkan PKH yaitu memberikan bantuan finansial kepada keluarga kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan anak penerima bantuan PKH bidang pendidikan benar adanya memanfaatkan dana bantuan yang diberikan. Dalam observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat uang tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, baju seragam, dan alat-alat tulis, serta buku untuk membayar sumbangan SPP dan komite. Selain itu sisa uang juga digunakan untuk membayar hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Seperti pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1. Pemanfaatan Bidang Pendidikan**  
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat sebelah kiri merupakan gambar penggunaan uang PKH untuk membayar uang komite di sekolah, kemudian terlihat pada gambar sisi kanan seperti buku, topi, dan seragam, merupakan bukti bahwa keluarga penerima manfaat memang benar adanya menggunakan uang PKH yang diberikan untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya.

### Peran Aktif Pendamping PKH dan Sosialisasi Penyuluhan

Sosialisasi merupakan proses penyampaian gagasan yang membantu masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan cara beradaptasi serta berpikir, agar mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial atau lingkungan masyarakat (Herdiana 2018). Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membangun motivasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan dan penggunaan bantuan yang disalurkan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) untuk biaya pendidikan anak-anak nya. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh pendamping PKH Nagari III Koto Aur Malintang Timur setiap satu bulan sekali nya, hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat penerima PKH agar dapat mencapai graduasi secara mandiri. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ira Wati (KPM 43 th) sebagai berikut.

“...Saya sebagai penerima PKH ini ada syarat yang emang harus dijalankan, contohnya harus wajib ikut kumpulan rapat setiap sebulan sekalinya, rapat ini diadakan oleh pendamping PKH langsung, jadi nanti kami di berikan arahan bagaimana caranya menggunakan uang bantuan yang diberikan, bagaimana caranya membantu mendidik anak-anak, dan uang bantuan yang diberikan ini bukan untuk membeli emas, honda baru, atau hal-hal yang lain nya, tetapi untuk biaya sekolah anak. Pertemuan ini wajib dihadiri, jika tidak hadir maka bantuan tidak akan cairkan, kemudian jika sudah lebih dari tiga kali tidak hadir maka bantuan nya bisa di cabut dan digantikan oleh orang lain...” (Wawancara langsung 06 Maret 2025)

Ibu Ira Wati (43 th) selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyatakan bahwa masyarakat yang menerima bantuan PKH memiliki kewajiban yang harus diikuti setiap satu bulan sekalinya sebagai partisipasi keaktifan, pertemuan ini dilaksanakan bersama dengan pendamping PKH, biasanya dalam pertemuan ini kami ibu-ibu penerima PKH dapat membelakan materi mengenai penggunaan dana PKH serta mengatur keuangan keluarga. Selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Fitri Nawita (42 th) sebagai berikut.

“...Sebagai penerima bantuan PKH, kami ibu-ibu ini biasanya ada pergi rapat pertemuan kelompok bulanan, pertemuan itu dilakukan di aula nagari atau salah satu rumah KPM, semua KPM wajib datang dikarenakan pendamping nya juga datang. Dalam pertemuan itu yang diajarkan mengenai penggunaan dana bantuan, pertemuan kelompok ini wajib diikuti oleh masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan PKH sebagai tanda aktif partisipasi...” (Wawancara langsung 10 April 2025)

Disisi lain hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Weni Armayunita (30 th) selaku tetangga penerima PKH, menyatakan bahwa memang benar adanya kegiatan yang selalu diikuti oleh tetangganya setiap satu bulan sekali. Ia melihat tetangga nya ikut serta aktif dalam pertemuan bulanan yang dilaksanakan oleh pendamping PKH. Pendamping memberikan materi kepada masyarakat penerima terkait pemanfaatan dan penggunaan dana yang telah diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan tanggung jawab serta keaktifan pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan PKH. Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Halja Sariahmad (40 th, pendamping PKH) menjelaskan.

“...Saya sebagai pendamping PKH, terus mengulangi materi yang sama agar ibu-ibu penerima PKH selalu mengingat bahwa bantuan ini bukan hanya sekedar uang yang diberikan cuma-cuma, tetapi untuk mendukung biaya pendidikan anak-anak mereka. Dana yang diberikan sebaiknya dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, seperti membeli perlengkapan sekolah, serta memastikan anak-anak mereka telah mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dan baik...” (Wawancara langsung, 14 April 2025)

Ungkapan dari Bapak Halja Sariahmad (40 th pendamping PKH) menjelaskan bahwa ia selalu memberikan arahan yang sama kepada keluarga penerima bantuan agar masyarakat tidak lalai dalam komitmennya dan menggunakan uang bantuan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian ia juga memastikan bahwa anak-anak penerima PKH telah mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Dengan hal ini ia berharap masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan bantuan dengan baik sehingga pelaksanaan PKH benar-benar membawa manfaat bagi keluarga kurang mampu di Nagari III Koto Aur Malintang Timur.

Berdasarkan penjelasan informan di atas di dapatkan bahwa sebagai keluarga penerima bantuan PKH terdapat satu syarat yang wajib diikuti oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu kegiatan sosialisasi atau pertemuan kelompok satu bulan sekali yang dilaksanakan di Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Pertemuan ini diadakan langsung oleh pendamping PKH, bertujuan untuk memberikan sosialisasi atau edukasi kepada ibu-ibu penerima bantuan PKH agar dapat menggunakan bantuan yang diberikan dengan bijak, sesuai dengan tujuan awal PKH. Selain itu pertemuan bulanan ini juga bertujuan untuk merubah pola

pikir masyarakat penerima PKH agar cepat mencapai graduasi atau ekonomi mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Sejalan dengan teori struktural fungsional oleh Merton mengenai konsep fungsi manifest yaitu program PKH tidak hanya sekedar menyalurkan bantuan, tetapi juga membantu membentuk nilai-nilai baru di masyarakat.

### **Mindset/ Kesadaran dan Tanggung Jawab Keluarga Penerima PKH**

Mindset terdiri dari sekumpulan asumsi, metode, atau keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang tertanam dengan kuat dalam diri mereka. Menurut Mulyadi (2007:71), mindset adalah sikap mental yang terbentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Pola pikir (mindset) merujuk pada cara seseorang menilai dan menarik kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu, atau cara seseorang berpikir dan memandang sesuatu. Pola pikir seseorang akan mempengaruhi cara dia melakukan suatu tindakan berperilaku, serta mengembangkan dirinya (Suriyanti 2020).

Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, setelah peneliti melakukan penelitian bahwa masyarakat yang memiliki anak usia sekolah, lebih mementingkan pendidikan anaknya terlebih dahulu, seperti ketika dana PKH cair maka uang tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya, seperti seragam sekolah, alat tulis, tas, sepatu, dan lainnya. Karena menurut mereka dana PKH sangat membantu sekali untuk memenuhi biaya pendidikan anak, seperti uang komite yang sudah tertunggak dapat terbayarkan dengan dana PKH yang telah diterima. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Opet Susanti (40 Th) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai berikut.

”...Bantuan PKH yang di dapatkan saya gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah anak dulu, tiap keluar uang bantuan ini baju atau buku anak saya wajib ganti, saya ya lebih mendahulukan pendidikan anak yang utamanya, bagaimana caranya anak sekolah bisa pakai baju yang bagus, tas yang bagus, sepatu yang bagus, biarpun saya susah tetapi sekolah anak nomor satu sekarang. Uang yang diberikan tidak ada ibu gunakan untuk membeli barang lain, misalnya membeli emas, membeli baju yang bagus, sebab itu bukan hak ibu tapi hak anak, dapat bantuan ini aja ibu sudah bersyukur sekali, jadi maaf katanya kalau sudah di tolong itu seharusnya kita tahu diri untuk menggunakan uangnya...” (Wawancara langsung 06 Maret 2025).

Pernyataan dari Ibu Opet Susanti (KPM, 40 th), menjelaskan bahwasanya dirinya menggunakan uang yang diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anaknya. Hal ini membuktikan bahwa mindset dan tanggung jawab yang dimiliki KPM memberikan pengaruh besar pada pola pikir KPM. Terlebih dirinya berasal dari keluarga yang kurang mampu dan merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan kepadanya. Hal yang sama juga didukung oleh pernyataan Ibu Jusmawati (49 th) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai berikut.

“...Anak ibu ada dua orang yang sedang sekolah, satu orang SMA dan satunya lagi SD, keduanya dapat uang PKH untuk sekolah. Ibu sendiri tidak ada mengambil uang itu untuk dibelikan ke barang dapur, sebab ibu tau itu hak anak ibu bukan hak ibu, ibu sebagai orang tua tau bagaimana seharusnya menggunakan uang bantuan PKH, bukan untuk gaya-gaya tapi untuk keperluan dan biaya sekolah anak-anak...” (Wawancara langsung 08 Maret 2025)

Ungkapan dari Ibu Jusmawati (KPM, 49 th), menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk membelikan uang bantuan PKH pada hal yang lain. Menurutnya bantuan ini hak untuk menunjang kebutuhan pendidikan anaknya, bukan untuk bergaya dan memanfaatkannya kepada hal yang tidak berguna, contohnya membelikan uang tersebut untuk motor baru atau hal-hal yang diluar yang bersangkutan dengan pendidikan.

Menurut penjabaran informan di atas, didapat bahwa pola pikir masyarakat sangat sejalan dengan tujuan utama dari program PKH, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu serta memastikan anak-anak mereka memperoleh akses pendidikan ke yang lebih layak. Masyarakat penerima bantuan PKH di Nagari III Koto Aur Malintang Timur memilih menggunakan uang PKH dengan sebaik mungkin untuk menunjang kebutuhan pendidikan anaknya. Sejalan dengan teori struktural fungsional oleh Merton yaitu dimana setiap konsekuensi-konsekuensi yang dilakukan masyarakat bisa bersifat disengaja maupun tidak disengaja, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan sengaja menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan pendidikan anak, bukan membeli barang lain atau motor baru. Meningkatnya kesadaran sosial dan tanggung jawab di tengah masyarakat merupakan fungsi laten yang tidak disadari sebelumnya.

### **Pembahasan**

Penelitian tentang faktor keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) pada keluarga kurang mampu di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang

Pariaman. Dianalisis menggunakan teori struktural fungsional oleh Robert K. Merton. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Merton mengembangkan dua konsep fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi menurut Merton, fungsi didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu” (1949/1968: 105). Dalam fakta sosial memusatkan perhatian pada adaptasi atau penyesuaian diri, karena adaptasi dan penyesuaian diri selalu memiliki akibat positif. Perlu diperhatikan bahwa satu faktor sosial dapat memiliki akibat negatif terhadap fakta sosial lain (Ritzer 2018). Robert K Merton juga memperkenalkan konsep fungsi nyata (*manifest*) dan fungsi tersembunyi (*latent*). Fungsi nyata (*manifest*) adalah fungsi yang diharapkan sedangkan fungsi tersembunyi (*latent*) adalah fungsi yang tidak diharapkan. Seperti, dalam bantuan sosial PKH memiliki fungsi *manifest* untuk meningkatkan pendidikan melalui keluarga penerima mengakses layanan pendidikan merupakan bentuk perwujudan tujuan dan fungsi PKH (Ritzer 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PKH. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwa proses seleksi calon penerima PKH yang dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan beberapa tahapan untuk mencapai masyarakat yang memang benar layak menerima bantuan PKH. Selain itu peneliti juga menemukan masyarakat penerima bantuan sosial PKH telah memanfaatkan uang bantuan sosial PKH di bidang pendidikan. Bantuan yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sesuai dengan kriteria anak usia sekolah 6-21 tahun (Despriyani & Imanda 2024). Pemanfaatan bantuan sosial PKH bidang pendidikan digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, dan membayar uang komite. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldiansyah, Hailuddin & Astuti (2024) yang menyatakan keberhasilan pelaksanaan PKH didorong oleh beberapa indikator, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kualitas kesehatan, pemenuhan pendidikan anak, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan selain pemanfaatan dana bantuan PKH sudah berjalan cukup baik, mindset dan tanggung jawab keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), karena adanya kesadaran yang muncul dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Rata-rata mayoritas penerima PKH berprofesi sebagai buruh tani, namun walaupun begitu masyarakat yang menerima bantuan sosial PKH tetap lebih memilih memprioritaskan pendidikan anak-anaknya dibandingkan hal lainnya. Sebab menurut masyarakat bantuan ini meringkankan beban mereka, khususnya untuk mencukupi biaya pendidikan agar anak tidak putus sekolah. Hasil temuan peneliti sesuai dengan konsep fungsi manifest dan fungsi laten yang dicetuskan oleh Merton. Menurut Merton fungsi diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu (Ritzer 2018).

Merton dalam teorinya mengenai konsep fungsi manifest dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan adalah untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Sebagian besar penerima PKH telah menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah, membayar uang komite dan spp, membeli seragam sekolah, serta membeli buku LKS yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan fungsi laten dapat diartikan sebagai konsekuensi yang tidak disengaja atau suatu tipe konsekuensi yang tidak terantisipasi atau fungsi yang tidak diantisipasi oleh sistem sosial. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, terdapat sejumlah konsekuensi yang muncul diluar prediksi sistem. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, ditemukan bahwa terdapat dampak-dampak yang tidak direncanakan dalam pemanfaatan bantuan PKH. Salah satu konsekuensi yang tidak dapat diantisipasi adalah munculnya kesadaran dalam diri keluarga penerima bantuan PKH mengenai pentingnya pendidikan (Ritzer 2018).

Selain konsep fungsi manifest dan laten Merton juga mengembangkan konsep disfungsi dapat diartikan sebagai struktur yang berperan dalam memelihara bagian-bagian sistem sosial, tetapi juga bisa menimbulkan konsekuensi negatif untuknya. Seperti dalam keberhasilan pelaksanaan PKH yang telah menciptakan konsekuensi positif agar sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Akan tetapi, masih saja ada konsekuensi yang tidak disadari dalam prosesnya sehingga akan mengganggu proses keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial PKH, seperti, pada ketergantungan yang ditimbulkan yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi PKH. ketergantungan penerima terhadap bantuan tersebut, hal ini dapat dilihat ketika masyarakat menerima bantuan PKH dan mereka berharap bantuan yang disalurkan kepada keluarganya tidak di putuskan atau diberhentikan, karena dengan adanya bantuan ini benar-benar sangat membantu sekali bagi mereka terutama untuk biaya pendidikan anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, hal tersebut sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh [Muluk & Rahmawati \(2024\)](#) penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan program ini didukung oleh beberapa faktor, seperti komitmen, respon positif masyarakat, dan pelaksanaan program yang tepat waktu. Namun, beberapa faktor juga menghambat efektivitas PKH, seperti terbatasnya jumlah penerima program, kecemburuan sosial, dan kurangnya dana bantuan.

Selanjutnya kajian [Sumbawati et al. \(2020\)](#) menjelaskan tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Suryawangi sudah dinyatakan baik dan dapat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Dalam indikator efektivitas yaitu pemahaman program, tepat waktu, tepat sasaran, tercapai tujuan dan perubahan nyata sudah berjalan dengan baik. Namun demikian PKH ini belum dikatakan sepenuhnya efektif dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilihat pada indikator ketepatan sasaran dan tepat waktu. Selain itu riset yang dilakukan oleh [Despriyani & Imanda \(2024\)](#) menjelaskan tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menyatakan bahwasanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sejauh ini sudah berjalan cukup efektif, hal tersebut dilandaskan dengan 4 aspek pelaksanaan PKH yaitu (Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan Pemantauan Program). Kemudian kajian yang dilakukan oleh [Mahmudah & Baihaqi \(2025\)](#) menjelaskan mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan menyatakan program PKH sudah cukup efektif dalam ketepatan sasaran dan pelaksanaan PKH. Namun ada beberapa saran untuk lebih memperhatikan penerima PKH agar pelaksanaan PKH berjalan lebih baik lagi kedepannya.

Masyarakat yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat menggunakan bantuan tersebut untuk menunjang pendidikan dan kesehatan keluarga. Program ini bertujuan untuk memperluas akses anak-anak dari keluarga kurang mampu terhadap layanan pendidikan serta menjaga kesejahteraan mereka. Dengan pemanfaatan dana bantuan secara tepat, PKH diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan PKH ([Kemensos 2023](#)). Ternyata, di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, para penerima bantuan PKH memanfaatkan dan menggunakan dana PKH sesuai dengan tujuannya. Seperti menggunakan dana tersebut untuk membeli perlengkapan sekolah, seragam, sepatu, buku, dan membayar hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anaknya seperti uang komite dan spp. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran, kesadaran dan pemahaman mengenai program PKH sudah sejalan dengan tujuan pelaksanaan program PKH. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih mendahulukan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima.

Keadaan paling baik adalah ketika kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan sudah terpenuhi terlebih dahulu melalui bantuan dana PKH, seperti membeli perlengkapan sekolah. Setelah kebutuhan utama tersebut tercukupi dan masih ada sisa uang bantuan, barulah uang tersebut digunakan untuk kebutuhan lain seperti membayar uang komite, SPP, dan ditabung. Peristiwa ini sesuai dengan teori struktural fungsional dari Merton mengenai konsep fungsi manifest yaitu fungsi yang diharapkan terjadi di masyarakat menggunakan dan memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai tujuan awal pelaksanaan PKH yaitu mengenai pendidikan. Fungsi laten program ini yaitu menimbulkan kesadaran dalam masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Dan disfungsi disini yaitu program PKH menimbulkan ketergantungan pada masyarakat penerima PKH. Dalam hal ini meskipun pelaksanaan PKH dikatakan fungsional bagi masyarakat, serta penggunaan dana sudah sesuai dengan tujuan utama program PKH ([Ritzer 2018](#)).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari III Koto Aur Malintang Timur, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan tersebut tidak hanya pada pemanfaatan dana PKH sesuai kriteria dan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018, tetapi juga pada proses seleksi calon penerima yang ketat dan bertahap untuk memastikan ketepatan sasaran. Proses seleksi dilakukan secara akurat dengan memanfaatkan data yang disediakan oleh pemerintah setempat. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan PKH didukung oleh kerjasama yang baik antara pemerintah nagari, pendamping PKH, dan koordinator PKH, serta adanya kesadaran dan tanggung jawab KPM akan pentingnya pendidikan untuk anaknya di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur untuk memberikan manfaat dalam pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Namun, penelitian ini masih terbatas pada faktor keberhasilan pelaksanaan PKH di Nagari III Koto Aur Malintang Timur. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi peluang untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda agar dapat melihat dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

---

## Daftar Pustaka

- Aldiansyah, C., Hailuddin, H., & Astuti, E. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 25-34. doi: 10.29303/oportunitas.v3i1.578.
- Arlayati, A. & Ikhwan, I. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan ( PKH ) Bagi Masyarakat Di Kelurahan Sungai Sapih. *Jurnal Perspektif* 8(1), 187–99.
- Wardani, W. A., Ismail, M., Kurniawansyah, E., & Sawaludin, S. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2189-2196. doi: 10.29303/jipp.v8i4.1706.
- BPS Sumbar. (2024) Presentase Penduduk Miskin Di Sumatera Barat Maret 2024. <https://sumbar.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/1309/persentase-penduduk-miskin-di-sumatera-barat-pada-maret-2024-sebesar-5-97-persen-.html>.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Despriyani, H. L. & Imanda, A. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 687–98.
- Hafsari, D. M., Asmara, K., & Paramita, V. N. (2024). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 272-282.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Infatih, N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 13(2), 103-109. doi: 10.19184/jpe.v13i2.11346.
- Kemensos RI. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Sosial 2022. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Mahmudah, R. A., Baihaqi, A., & Jumaidi, J. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 411-422.
- Miles, B. & Huberman, M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muluk, F. A., & Rahmawati, I. D. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Garis Kemiskinan Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(7).
- Nafisah, M., & Kholifah, E. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 15-15.. doi: 10.47134/pssh.v1i3.123.
- Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 44-68. doi: 10.24239/jimpi.v1i1.901.
- Nuryanti, N. (2019). Pemanfaatan Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Menyukkseskan Wajib Belajar XII Tahun 2019 di Kecamatan Pusako Siak. *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 2(1), 26–31.
- Putri, A. & Putra, E. V. (2024). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah. *Jurnal Perspektif* 7(1), 131–40. doi: 10.24036/perspektif.v7i1.880.
- Ritzer, G. (2018). *Teori Sosiologi Modern*. Depok: Prenadamedia Group.
- Setyawardani, D. T. R., Paat, C. J., & Lesawengen, L. (2020). Dampak bantuan PKH terhadap masyarakat miskin di kelurahan Bumi Nyiur kecamatan Wanea kota Manado. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, G. L. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 445-461.
- Sumbawati, N. K., Asmini, A., Juliawati, H., & Pamungkas, B. D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 194-203. doi: 10.58406/jeb.v8i3.570.
-

- 
- Suriyanti, E. (2020). Analisis Pola Pikir (Mindset), Penilaian Kerja Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. *Kindai* 16(1), 102–24.
- Syahdillah, A. & Suriyani, E. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Bidang Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wirang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB (Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(1), 92–102.
- Usman, C. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 1–13.
- Yulianti, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” *JIFE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3(2).
- Zulkarnain, C. (2018). Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Menteri Sarmidi Mangunsarkoro (1949-1950). *Jurnal Pendidikan Sejarah* 5(6), 1–11.